

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional, dimana dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan, stabilitas nasional, serta pertumbuhan ekonomi. Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, bank merupakan lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang.¹ Sehingga, perbankan mengemban tugas untuk menjadikan uang lebih efektif dan dapat meningkatkan nilai tambah dalam bidang ekonomi. Selain itu, perbankan berperan penting dalam menyalurkan dana yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan modal usaha dan sebagai sarana investasi bagi pemilik dana.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), hlm. 1.

taraf hidup masyarakat. Di Indonesia, struktur perbankan terbagi menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam rangka usaha, bank umum dapat melakukan kegiatan usahanya secara konvensional maupun dalam prinsip syariah. Sementara BPR hanya dibatasi melakukan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pada umumnya jasa perbankan terbagi atas dua tujuan. *Pertama*, jasa perbankan sebagai penyedia mekanisme alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Dalam hal ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien tersebut, maka barang yang dapat diperjualbelikan dengan cara tukar-menukar akan memakan waktu yang lama. *Kedua*, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan dana yang lebih produktif. Apabila peran ini dapat berjalan dengan baik, maka ekonomi suatu Negara akan meningkat.²

Pada tahun 2015, kinerja industri perbankan mengalami sedikit perlambatan seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik. Perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik juga berdampak pada perlambatan permintaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akibat dari turunnya permintaan barang dan jasa. Di sisi lain,

²Indra Permana Putra, *Analisis Tingkat Efisiensi Perbankan BUMN dan Bank Asing di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Juli 2013.

meningkatnya persepsi risiko kredit membuat perbankan semakin berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

Peran perbankan khususnya BPR atau BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan penyedia sumber modal tersebut idealnya dapat mendayagunakan potensi kredit/pembiayaan yang ada, khususnya UMKM yang berada di daerah operasionalnya sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan diantara UMKM, BPR, BPRS, dan juga pemilik dana. Ketika BPR atau BPRS tidak mampu untuk mengelola dengan baik potensi tersebut, tidak hanya BPR atau BPRS yang akan terancam tidak beroperasi lagi, kepercayaan nasabah terhadap BPR dan BPRS pun akan menurun dan terhambatnya perkembangan UMKM dikarenakan keterbatasan modal yang lebih lanjut mempengaruhi perkembangan ekonomi sektor riil.

Pada awalnya tidak banyak bank umum yang menyalurkan kredit kepada UMKM, terutama untuk usaha mikro. Pemberian kredit mikro awalnya lebih identik dilakukan oleh BPR dan lembaga keuangan mikro lainnya. *Cost and high labour* merupakan beberapa kendala bagi bank umum dalam melakukan pembiayaan mikro. Namun, seiring dengan semakin ketatnya persaingan penyaluran kredit kepada sektor korporasi dan ritel, cukup besarnya pangsa usaha mikro yang potensial untuk mendapatkan pembiayaan, serta margin keuntungan segmen mikro yang relatif lebih tinggi daripada sektor lainnya, mendorong bank umum untuk membiayai usaha mikro. Hal ini menyebabkan persaingan di segmen

mikro menjadi semakin ketat, termasuk persaingan antara bank umum dan BPR/BPRS.

Akibat dari tingkat persaingan yang ketat terhadap penyaluran kredit atau pembiayaan pada UMKM yang saat ini tidak hanya dilakukan oleh BPR atau BPRS yaitu juga dilakukan oleh bank umum baik konvensional maupun syariah, maka baik BPR maupun BPRS harus mampu menjaga kinerjanya agar tetap berjalan dengan baik dan efisien dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai tingkat efisiensi BPR dan BPRS agar dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk melihat dan mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi baik BPR maupun BPRS. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti BPR dan BPRS sebagai objek penelitian pada penelitian ini.

Persaingan BPR dan BPRS tidak bisa dihindarkan dan memberikan dampak yang mempengaruhi tumbuh kembangnya suatu bank. Sebuah bank harus mampu meningkatkan kinerja keuangannya untuk bisa bertahan dan mengembangkan eksistensinya. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, kinerja sangat penting karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa perbankan dalam bertransaksi.

Tabel 1.1 dan tabel 1.2 menunjukkan kinerja BPR dan BPRS periode 2011 – 2015 di Indonesia.

Tabel 1.1 Kinerja BPR menurut LDR dan ROA

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
LDR (%)	78.54	78.63	84.34	79.79	80.26
ROA (%)	3.32	3.46	3.44	2.98	2.80

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2011-2005

Tabel 1.2 Kinerja BPRS menurut FDR dan ROA

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
FDR (%)	127.71	120.96	120.93	124.22	125.15
ROA (%)	2.67	2.64	2.79	2.26	2.25

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2011-2005

Dalam tabel 1.1 terlihat bahwa dari tahun 2011-2015 BPR memiliki *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 78.54, 78.63, 84.34, 79.79 dan 80.26 persen. Apabila dibandingkan dengan *Fund to Deposit Ratio* (FDR) BPRS dari tahun 2011 – 2015 yaitu sebesar 127.71, 120.96, 120.93, 124.22 dan 125.15 persen, BPR memiliki nilai LDR yang lebih kecil daripada FDR BPRS. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam hal kesehatan bank, BPRS masih lebih unggul dibandingkan dengan BPR. Sebagian praktisi perbankan menyebutkan bahwa tingkat aman rasio LDR/FDR untuk dinyatakan bahwa bank tersebut itu sehat minimal 85%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa rasio LDR pada BPR masih dalam kategori bank yang kurang sehat.

Dalam tabel 1.1, pada tahun 2011 – 2015 BPR memiliki rasio *Return On Assets* (ROA) sebesar 3.32, 3.46, 3.44, 2.98 dan 2.80 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap Rp 1 aset yang digunakan BPR

pada tahun 2011 – 2015 akan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0.0332, Rp 0.0346, Rp 0.0344, Rp 0.0298 dan Rp 0.028. Sedangkan BPRS pada tahun yang sama memiliki ROA sebesar 2.67, 2.64, 2.79, 2.26 dan 2.25. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap Rp 1 aset yang digunakan BPRS dalam tahun 2011 – 2015 akan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0.0267, Rp 0.0264, Rp 0.0279, Rp 0.0226 dan Rp 0.0245. Dalam hal ROA, BPR lebih unggul dibandingkan dengan BPRS dikarenakan jumlah aset yang dimiliki oleh BPR lebih banyak dibandingkan dengan BPRS.

Tabel 1.3Jumlah BPR dan BPRS di Indonesia

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
BPR	1669	1653	1635	1643	1637
BPRS	155	158	163	163	163

Sumber:Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2011-2005

Tabel 1.3 menunjukkan jumlah BPR yang jauh melampaui jumlah BPRS yang ada di Indonesia. Jumlah BPR pada tahun 2011 – 2013 mengalami penurunan, pada tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah BPR, namun pada tahun 2015 jumlah BPR kembali mengalami penurunan. Sedangkan jumlah BPRS dari tahun 2011 – 2015 mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa BPRS masih dalam tahap perkembangan menuju Bank Perkreditan Rakyat berbasis Syariah yang berkinerja baik.

Dalam hal perkembangan BPR/BPRS provinsi, BPR/BPRS di provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kantor BPR/BPRS tertinggi apabila dibandingkan dengan jumlah kantor BPR/BPRS di provinsi yang lainnya seperti yang tertera dalam tabel 1.4. Hal ini tentu saja akan menjadikan

BPR/BPRS di provinsi Jawa Timur memiliki persaingan yang ketat dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat maupun UMKM. Persaingan antara BPR/BPRS di provinsi Jawa Timur ini menarik untuk diteliti untuk menentukan mana yang mempunyai kinerja terbaik dan beroperasi secara efisien.

Tabel 1.4Jumlah BPR dan BPRS Menurut Provinsi di Indonesia

Provinsi	BPR	BPRS	Provinsi	BPR	BPRS
Jawa Barat	294	28	Kalimantan Barat	21	-
Banten	65	8	Kalimantan Timur	14	1
DKI Jakarta	24	1	Kalimantan Tengah	4	-
DIY	54	11	Sulawesi Tengah	9	-
Jawa Tengah	253	26	Sulawesi Selatan	22	8
Jawa Timur	325	29	Sulawesi Utara	18	-
Bengkulu	4	2	Sulawesi Tenggara	17	-
Jambi	19	-	Sulawesi Barat	2	-
Aceh	5	10	Gorontalo	4	-
Sumatera Utara	55	8	NTB	29	3
Sumatera Barat	93	7	Bali	137	1
Riau	33	3	NTT	11	-
Kep. Riau	40	1	Maluku	2	-
Sumatera Selatan	20	1	Papua	6	1
Bagka Belitung	3	1	Maluku Utara	2	1
Lampung	26	10	Papua Barat	1	-
Kalimantan Selatan	25	1			

Sumber:Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015

Pada tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa jumlah BPR dan BPRS terbanyak berada di provinsi Jawa Timur, dimana terdapat 325 BPR dan 29 BPRS. Hal ini menyebabkan terjadinya tingkat persaingan yang sangat ketat antara BPR dan BPRS sebagai lembaga keuangan yang bertindak

sebagai pemberi kredit atau pembiayaan bagi UMKM yang ada di Jawa Timur. Sehingga untuk memenangkan persaingan tersebut, BPR maupun BPRS harus selalu memperbaiki kinerja dan efisiensi mereka supaya bisa selalu bersaing dengan para pesaingnya.

Kinerja BPR/BPRS tersebut tentunya perlu diukur untuk melihat pengelolaan dan bertujuan untuk mengarahkan BPR/BPRS beroperasi secara efisien. Efisiensi dapat diukur dengan pendekatan non-parametrik dan parametrik. Menurut Berger dan Mester (1997) pengukuran efisiensi yang melibatkan tingkat input dan output umumnya memiliki nilai yang beragam serta bersifat *stochastic*. Penggunaan metode parametrik yaitu *Stochastic Frontier Approach(SFA)* diasumsikan salah satu pendekatan yang tepat untuk mengukur tingkat efisiensi BPR/BPRS di Indonesia.

Metode SFA mengasumsikan batasan fungsi keuntungan (*frontier profit*) dalam membandingkan profit aktual dan maksimum yang dapat dicapai suatu BPR/BPRS dalam kegiatan operasionalnya. Konsep efisiensi keuntungan alternatif diterapkan karena tidak adanya ketentuan mengenai harga output yang dihasilkan dan jenis pasar yang dihadapi BPR/BPRS yang diasumsikan memiliki persaingan pasar tidak sempurna. Pengukuran efisiensi membandingkan pengelolaan input dari masing-masing BPR/BPRS untuk memaksimalkan outputnya.

Pada penelitian ini metode pengukuran yang digunakan adalah *Stochastic Frontier Approach(SFA)*. Peneliti menggunakan metode SFA

pada penelitian ini karena SFA sebagai metode untuk mengukur efisiensi masih jarang di Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan suatu studi yang lebih mendalam untuk mengukur efisiensi perbankan syariah khususnya BPR dan BPRS serta untuk menyusun ukuran yang tepat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian yang berjudul **“PERBANDINGAN EFISIENSI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DENGAN METODE *STOCHASTIC FRONTIER APPROACH* (SFA) (Studi Kasus BPR dan BPRS di Jawa Timur Periode 2011 – 2015)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel harga dana dan harga tenaga kerja berpengaruh terhadap keuntungan BPR dan BPRS di Jawa Timur pada periode 2011-2015?
2. Apakah variabel total kredit dan total pembiayaan berpengaruh terhadap keuntungan BPR dan BPRS di Jawa Timur pada periode 2011-2015?
3. Bagaimana tingkat efisiensi BPR dan BPRS di Jawa Timur pada periode 2011-2015 dengan metode SFA?
4. Apa saja penyebab ketidakefisienan BPR dan BPRS di Jawa Timur pada periode 2011-2015 dengan metode SFA?

5. Apakah terdapat perbedaan tingkat efisiensi BPR dan BPRS di Jawa Timur pada periode 2011-2015 dengan metode SFA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh variabel harga dana dan harga tenaga kerja terhadap keuntungan BPR dan BPRS di Jawa Timur pada periode 2011-2015.
2. Mengetahui pengaruh variabel total kredit dan total pembiayaan terhadap keuntungan BPR dan BPRS di Jawa Timur pada periode 2011-2015.
3. Mengetahui tingkat efisiensi BPR dan BPRS di Jawa Timur pada periode 2011-2015 dengan metode SFA.
4. Mengetahui dan mengidentifikasi penyebab ketidakefisienan BPR dan BPRS di Jawa Timur pada periode 2011-2015 dengan metode SFA.
5. Mengetahui perbandingan tingkat efisiensi BPR dan BPRS di Jawa Timur pada periode 2011-2015 dengan metode SFA.

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka dalam hal ini peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel input yang berupa Harga Dana dan Harga Tenaga Kerja dan variabel output yang berupa Total Kredit bagi BPR dan Total Pembiayaan bagi BPRS.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan BPR Konvensional dan BPR Syariah di Jawa Timur pada periode 201-2015.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang perbankan khususnya mengenai perbandingan tingkat efisiensi BPR Konvensional dan BPR Syariah di Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi dunia perbankan, dapat memberikan masukan yang berguna bagi perbankan guna meningkatkan kinerja perbankan yang lebih efisien dan sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Bagi pengguna jasa perbankan, dapat memberikan informasi kepada pengguna jasa perbankan mengenai tingkat efisiensi perbankan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

- c. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbankan khususnya yang berkaitan dengan tingkat efisiensi BPR Konvensional dan BPR Syariah di Jawa Timur.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II : Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana dalam bab ini terdiri atas beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, populasi dan sampel, gambaran umum objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan metode analisis data.

BAB IV : Analisa Data dan Pembahasan

Padabab ini akan diuraikan mengenai analisa data dan pembahasan dari penelitian ini, dimana dalam bab ini terdiri atas beberapa sub bab.

BAB V : Penutup

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

